

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kedungdung mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Kedungdung pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kedungdung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kedungdung Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%	3.481.312.209,-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	23.882.023,-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Jumlah Dokumen Renja SKPD b. Jumlah Dokumen Renstra SKPD	2 Dok	3.685.609,-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	3.753.310,-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	3.649.350,-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	3.574.650,-

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	3.685.651,-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ, LPPD, dan Dokumen SAKIP SKPD	3 Dok	5.535.458,-
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>2.947.215.450,-</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	34 ASN	2.947.215.450,-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang dibutuhkan	450 buah	0,-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ SKPD	12 Bulan	2.355.832,-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Akhir Tahun	1 Dok	3.893.372,-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semester	16 Dok	3.862.439,-
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>4.018.675,-</b>
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Konsultasi/ Seminar	1 ASN	4.018.675,-
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrsai Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>71.688.172,-</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	146 buah	8.203.540,-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90 buah	6.200.000,-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	148 buah	5.154.303,-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuihan alat tulis kantor	249 buah	4.272.694,-

7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5275 lembar	3.693.100,-
7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 Bulan	1.800.000,-
7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin tamu	60 ok	2.400.000,-
7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Jumlah Mamin rapat dinas b. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti c. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang diikuti	420 ok 108 ok 5 ok	39.964.535,-
<b>7.01.01.2. .07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>119.031.550,-</b>
7.01.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan	1 unit	66.000.000,-
7.01.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan	22 unit	0,-
7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	53.031.550,-
<b>7.01.01.2. .08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>76.450.261,-</b>
7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat terkirim	500 Surat	2.845.261,-
7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan air, listrik dan internet	12 Bulan	31.605.000,-
7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Penjaga Malam	48 ob	42.000.000,-
<b>7.01.01.2. .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>224.150.000,-</b>
7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	11 Unit	3.850.000,-
7.01.01.2. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair yang dipelihara	20 Unit	2.720.000,-

7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit	8.050.000,-
7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	2 Unit	209.530.000,-
<b>7.01.01.2 .13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>4.763.430,-</b>
7.01.01.2. 13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	a. Jumlah Dokumen IKM b. Jumlah promosi pelayanan publik yang diikuti	1 Dok 3 Keg	4.763.430,-
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>a. Presentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang Ditindak-lanjuti Tepat Waktu</b> <b>b. Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak-lanjuti</b>	<b>a. 100%</b> <b>b. 100%</b>	<b>4.443.980,-</b>
<b>7.01.02.2 .04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Diproses</b>	<b>5 Keg</b>	<b>4.443.980,-</b>
7.01.02.2. 04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non-Perizinan	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	100%	4.443.980,-
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan</b>	<b>64%</b>	<b>68.376.176,-</b>
<b>7.01.03.2 .01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pembedayaan Desa</b>	<b>2 Keg</b>	<b>68.376.176,-</b>
7.01.03.2. 01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	a. Jumlah dokumen Musrenbangcam yang Dihasilkan b. Jumlah Musrenbangcam yang dilaksanakan c. Jumlah Pra-Musrenbangcam yang Dilaksanakan	a. 1 Dok b. 1 Kali c. 1 Kali	27.111.508,-
7.01.03.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah desa binaan PKK b. Jumlah rapat bulanan PKK di kecamatan	a. 2 Desa b. 12 Bln	41.264.668,-
<b>7.01.04</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan</b>	<b>64%</b>	<b>15.420.000,-</b>

7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Terlaksanananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>12 Bln</b>	<b>15.420.000,-</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah Poskamling yan Aktif b. Jumlah Siskamling yang Aktif	a. 18 Desa b. 18 Desa	15.420.000,-
7.01.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan</b>	<b>64%</b>	<b>17.916.796,-</b>
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>18 Desa</b>	<b>17.916.796,-</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi APBDesnya	18 Desa	13.240.000,-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan administrasinya	18 Desa	4.676.796,-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	14 Desa	0,-
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>3.587.469.161</b>

Pada Tahun 2022 Kecamatan Kedungdung akan melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 3.587.469.161,-** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 12 kegiatan dengan 37 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Kedungdung dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### **4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2022**

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada Tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

### **1. TINDIK (Tim Informasi Dini Kecamatan Kedungdung)**

Adanya keterlambatan informasi yang diterima oleh pihak kantor kecamatan terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat baik di bidang keamanan, ketertiban, kebencanaan, lingkungan, kejadian luar biasa maupun informasi social lainnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedungdung.

Kecamatan Kedungdung merupakan ujung tombak pelayanan dalam merespon hal-hal yang terjadi di wilayah kerjanya secepat mungkin, minimal meneruskan informasi yang valid kepada Bupati ataupun OPD yang berkompeten.

Kurangnya koordinasi dengan kalangan tokoh masyarakat dan pemuda yang sangat aktif dalam pemberitaan di media-media sosial.

Untuk itu sangat penting untuk membentuk forum informasi lintas sektoral antara pihak Kantor Kecamatan Kedungdung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Maka dibentuklah forum kemasyarakatan tersebut dengan nama Tim Informasi Dini Kecamatan (TINDIK) yang anggotanya terdiri dari staf kecamatan, aparatur pemerintahan desa, anak-anak muda Karang Taruna, relawan sosial dan tokoh-tokoh masyarakat yang aktif dalam pemberitaan di media sosial.

Melalui inovasi TINDIK ini diharapkan adanya informasi cepat dan akurat dari bawah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di desa sehingga Kantor Kecamatan Kedungdung cepat merespon atas hal-hal tersebut.

Tujuan inovasi ini untuk Untuk memberikan informasi cepat dan akurat untuk kemudian ditanggapi secara cepat oleh pihak Kecamatan.

## **2. NGENTAS STUNTING (Penanggulangan Tuntas Stunting di Daerah Lokus Stunting)**

Inovasi pelayanan publik yang diberikan Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedungdung bersama Puskesmas Kedungdung untuk mengurangi angka stunting di Kecamatan Kedungdung dengan metode sweeping Tujuan inovasi ini mempercepat proses administrasi kependudukan di desa , membuat aplikasi yang terintegrasi antara desa dengan kecamatan dibidang pelayanan kependudukan dan meminimalisir penggunaan operator tenaga manusia dan memper singkat waktu pembuatan surat menyurat kependudukan.

Tujuan inovasi ini untuk Mengurangi jumlah angka stunting di Kecamatan Kedungdung

## **3. BIARIN (Pembinaan dan Pelayanan *TeRINtegrasi* Kecamatan)**

Inovasi pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Kedungdung untuk Kepala Desa dan Perangkat desa berkaitan dengan penyusunan administrasi di Pemerintah Desa.

Tujuan inovasi ini untuk melakukan program pembinaan dan pelayanan secara terintegrasi dan sistematis di seluruh desa di Kecamatan Kedungdung.

## **4. SIPATEN ALADINIH (Sistem Pelayanan Terpadu Kecamatan Kedungdung untuk warga)**

Inovasi pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Kedungdung untuk warga dalam hal pengurusan surat pindah datang, Kartu Keluarga, surat perekaman E – KTP, surat keterangan tanah dan surat keterangan ahli waris di disetiap hari pasaran yakni Selasa dan Jumat.

Tujuan inovasi ini untuk Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kedungdung untuk mengurus surat permohonan ke Kecamatan.